

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. SMK Permata Gabus

a. Profil



Nama Sekolah	: SMK PERMATA NUSANTARA
NPSN	: 20352105
Alamat	: JL. RAYA GABUS - PATI
Kodepos	: 59173
Desa/kelurahan	: Gabus
Kecamatan	: Gabus
Kabupaten/Kota	: Pati
Provinsi Prov.	: Jawa Tengah
Status Sekolah	: SWASTA
Waktu Penyelenggaraan	: Pagi/6 hari
Jenjang Pendidikan	: SMK
Naungan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
No. SK. Pendirian	: 421.3/4018/2009
Tgl. SK. Pendirian	: 2009-02-16
No. SK. Operasional	: 640/54/I/01.02/2009
Tgl. SK. Operasional	: 2009-02-16
Akreditasi	: C

Tgl. SK. Akreditasi : 01-01-1990
 No. Sertifikasi Iso : Belum Bersertifikat
 Kepala : Sri Hartini.¹

b. Visi dan Misi

Visi

Menjadi yang terbaik dengan mengejar keunggulan prestasi dan berakhlak mulia.

1) Misi

Meningkatkan kualitas manajemen melalui sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000;

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikuti pendidikan, latihan dan pengembangan;

3) Meningkatkan mutu program pembelajaran dengan dunia usaha dan industri

4) Mengembangkan sekolah bertaraf nasional dan internasional dengan penerapan

5) Meningkatkan mutu tamatan yang berbudi pekerti luhur dan professional.²

c. Susunan Pengurus Komite SMK Permata Nusantara

Ketua : H. Basuni Ghofur

¹ Dikutip dari dokumen SMK Permata Nusantara Gabus Pati, pada tanggal 10 Desember 2018

² Dikutip dari dokumen SMK Permata Nusantara Gabus Pati, pada tanggal 10 Desember 2018

Sekretaris : Ahmadi

Bendahara : Marsinah

- 1) Bidang Pembangunan dan Sarana Prasarana : Sukarno
- 2) Bidang Penelitian dan Pengembangan : Wahyu Widodo
- 3) Bidang Penggalangan Dana : Agung Sugondo
- 4) Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi : Jumentoro
- 5) Bidang Komunikasi Publik : Agus Paijo.³

2. SMK Taruna Gabus

a. Profil

Nama Sekolah : SMK TARUNA BANGSA

NPSN : 20341221

Alamat : JL. PATI - KAYEN KM 7

Kodepos : 59173

Desa/kelurahan : Pantirejo

Kecamatan : Gabus

Kabupaten/Kota : Pati

Provinsi : Prov. Jawa Tengah

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

jenjang Pendidikan : SMK

Naungan : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

³ Dikutip dari dokumen SMK Permata Nusantara Gabus Pati, pada tanggal 10 Desember 2018

No. SK. Pendirian : 422/0858
Tgl. SK. Pendirian : 1900-01-01
No. SK. Operasional : 422-0858
Tgl. SK. Operasional : 2008-03-01
Akreditasi : B
No. SK. Akreditasi :
Tgl. SK. Akreditasi : 01-01-1990
No. Sertifikasi Iso : Belum Bersertifikat
Nama Kepala : Subandi.⁴

d. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi Sekolah kejuruan yang meluluskan siswa/i cakup dalam spiritual, sosial, dan unggul dalam kompetisi pasar global.

2) Misi Sekolah

a) Menyelenggarakan manajemen sekolah yang ideal sesuai standar nasional pendidikan.

b) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran kejuruan keahlian secara terstruktur dan sistemik sesuai dengan kurikulum nasional dan kebutuhan pasar global.

⁴ Dikutip dari dokumen SMK Taruna Bangsa Gabus Pati, pada tanggal 11 Desember 2018

- c) Meningkatkan kecakapan keahlian dengan menciptakan dan atau membangun network pasar global dan kegiatan ekstrakurikuler.
- d) Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk membentuk karakter religius.⁵

e. Susunan Pengurus Komite SMK Taruna Bangsa

Ketua : Sunariyadi, S.Pd.

Sekretaris : Heriyanto

Bendahara : Sumini

1) Bidang Pembangunan dan Sarana Prasarana : Ahmad Sukendar

2) Bidang Penelitian dan Pengembangan : Mahin

3) Bidang Penggalangan Dana : Abdul Mu'ty, S.Pd.

4) Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi : Siswanto

5) Bidang Komunikasi Publik : Abdul Kalim, S.Pd.⁶

3. SMK Nurul Qur'an Jaken

a. Profil

Nama : SMK NURUL QURAN

NPSN : 69849641

Alamat : Jl. Raya Juwana Pucakwangi

Kode Pos : 59183

⁵ Dikutip dari dokumen SMK Taruna Bangsa Gabus Pati, pada tanggal 11 Desember 2018

⁶ Dikutip dari dokumen SMK Taruna Bangsa Gabus Pati, pada tanggal 11 Desember 2018

Desa/Kelurahan : Pucakwangi
Kecamatan/Kota (LN) : Pucakwangi
Kab.-Kota/Negara (LN) : Pati
Propinsi/Luar Negeri : Jawa Tengah
Status Sekolah : SWASTA
Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari
Jenjang Pendidikan : SMK
No. SK. Pendirian : 421.3/07822/2013
Tanggal SK.Pendirian : 2013-11-23
No. SK. Operasional : 421.3/07822/2013
Tanggal SK Operasional : 2013-11-23
Akreditasi : Belum Terakreditasi
No. SK. Akreditasi :
Tanggal SK. Akreditasi : 1990-01-01
No. Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat
Nama Yayasan : PERGURUAN ILMU AL QUR'AN
Alamat : Jl. Raya Juwana Pucakwangi Km-13
Nama Pimpinan : H. MOH. THOHIR, S.Pd.I
Desa / Kelurahan : TEGALWERO
No. Akte Yayasan :
Tanggal Akte Yayasan : 2014-10-18
Nama Kepala : Drs. Moh.Asrof, M.H.⁷

⁷ Dikutip dari dokumen SMK Nurul Qur'an Jaken Pati, pada tanggal 12 Desember 2018

b. Visi, Misi dan Tujuan

1) Visi Smk Nurul Qur'an

Terciptanya SMK Nurul Qur'an sebagai sekolah unggulan bertaraf internasional yang menghasilkan SDM yang memiliki keterampilan profesional, berakhlak luhur dan mampu bersaing secara global.

2) Misi SMK Nurul Qur'an

- a) Menyelenggarakan pendidikan bidang keahlian Multimedia yang berkualitas tinggi
- b) Memberikan pelayanan yang baik kepada siswa, orang tua dan mitra sekolah
- c) Memberikan kesejahteraan dan kesempatan peningkatan kemampuan kepada guru dan karyawan
- d) Manajemen sekolah yang berstandar ISO9001: 2000
- e) Membangun mitra kerja

3) Tujuan SMK Nurul Qur'an

- a) Menyiapkan peserta didik dengan keterampilan yang profesional agar menjadi manusia produktif, mandiri dan mampu mengisi lowongan pekerjaan pada DU/DI sesuai dengan kompetensinya.
- b) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir kehidupannya dengan ulet dan gigih dalam persaingan global.

- c) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan akidah agar mampu mengembangkan diri secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan lebih tinggi.
- d) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi sesuai dengan program keahlian yang dipilih.⁸

c. Susunan Pengurus Komite SMK Nurul Qur'an

Ketua : Ahmad Baidlowi, S.Pd.

Sekretaris : Moh Sholeh

Bendahara : Kuntoyo, S.Pd.

1) Bidang Pembangunan dan Sarana Prasarana : Moh Sohip

2) Bidang Penelitian dan Pengembangan : Mustafa Yatmi

3) Bidang Penggalangan Dana : Dahlan, S.Pd.

4) Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi : Adnan

5) Bidang Komunikasi Publik : Syardiman, S.Pd.⁹

4. SMK Al-Falah Winong

a. Profil

Nama : SMK AL FALAH WINONG PATI

NPSN : 20339025

Alamat : Jl. Winong - Pucakwangi KM. 05

Kode Pos : 59181

⁸ Dikutip dari dokumen SMK Nurul Qur'an Jaken Pati, pada tanggal 12 Desember 2018

⁹ Dikutip dari dokumen SMK Nurul Qur'an Jaken Pati, pada tanggal 12 Desember 2018

Desa/Kelurahan : Pekalongan

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Winong

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kab. Pati

Propinsi/Luar Negeri : Prov. Jawa Tengah

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan : SMK

No. SK. Pendirian : 728/103/1/1995

Tanggal SK.Pendirian : 1900-01-01

No. SK. Operasional : 728/103/1/1995

Tanggal SK Operasional : 1995-05-08

Akreditasi : C

No. SK. Akreditasi :

Tanggal SK. Akreditasi : 1990-01-01

No. Sertifikasi ISO : 9001:2008

Nama Kepala : Muchlisin

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah

Alamat : Karang Konang Km.05

Nama Pimpinan : Drs. H. Hamid Hasan, M.Sc.

Desa / Kelurahan : Pekalongan.¹⁰

b. Visi dan Misi

1) Visi

¹⁰ Dikutip dari dokumen SMK Al-Falah Winong Pati, pada tanggal 13 Desember 2018

Sekolah SMK yang unggul dalam bidang bisnis manajemen, teknologi dan kesehatan berdasarkan imtaq.

2) Misi Sekolah

Menghasilkan lulusan SMK yang inovatif, normatif, adaptif, dan produktif melalui diklat program keahlian akuntansi, teknik komputer jaringan, teknik sepeda motor dan farmasi.¹¹

c. Susunan Pengurus Komite SMK Permata Nusantara

Ketua : M Subhan, SH.

Sekretaris : M Ridlwan

Bendahara : Sukarman, SE.

1) Bidang Pembangunan dan Sarana Prasarana : Imam Bukhori, S.Pd.

2) Bidang Penelitian dan Pengembangan : Sunardi, S.Pd.

3) Bidang Penggalangan Dana : Abdurrohman

4) Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi : Ahamd Zaki

5) Bidang Komunikasi Publik : Kartono.¹²

5. SMK Putra Mahkota Jatiroto Kayen

a. Profil

Nama Sekolah : SMK PUTRA MAHKOTA

NPSN : 20360724

Alamat : JATIROTO KAYEN

¹¹ Dikutip dari dokumen SMK Al-Falah Winong Pati, pada tanggal 13 Desember 2018

¹² Dikutip dari dokumen SMK Al-Falah Winong Pati, pada tanggal 13 Desember 2018

Kode Pos : 59171

Desa/Kelurahan : Jatiroto

Kecamatan/Kota (LN) : Kayen

Kab.-Kota/Negara (LN) : Pati

Propinsi/Luar Negeri : Jawa Tengah

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari

Jenjang Pendidikan : SMK

No. SK. Pendirian : 422/1539/2010

Tanggal SK.Pendirian : 2010-04-13

No. SK. Operasional : 422.1539/2010

Tanggal SK Operasional : 2010-04-13

Akreditasi : Belum Terakreditasi

No. SK. Akreditasi : 0

Tanggal SK. Akreditasi : 1990-01-01

No. Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat

Nama Kepala : Khafid Akhmad

Yayasan

Nama Yayasan : YPI AL MASYHUR PATI

Alamat : Jl. KH. Metaram KM.1 Jatiroto

Nama Pimpinan : H. ALI MASYKURI, S.Pd.I

Desa / Kelurahan : Jatiroto

No. Akte Yayasan :

Tanggal Akte Yayasan : 2014-06-03¹³

b. Visi, Misi, dan Tujuan

1) Visi

SMK Putra Mahkota sebagai unsur pendidikan lanjutan adalah:

UNGGUL DALAM BERILMU BERIMAN DAN BERAMAL.

Dengan indikator:

a) Terbentuknya peserta didik yang berilmu pengetahuan unggul dalam prestasi akademik maupun non akademik sebagai bekal melanjutkan pendidikan dan kemandirian serta bertanggungjawab.

b) Terciptanya peserta didik yang berwawasan Iman dan Taqwa (IMTAQ), ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta berakhlakul karimah.

2) Misi

Misi SMK Putra Mahkota adalah:

a) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam mencapai prestasi akademik maupun non akademik

b) Menerapkan nilai dan norma akhlak mulia dalam seluruh kegiatan pembelajaran dengan pendekatan uswatun hasanah

c) Meningkatkan bertahap untuk mencapai nilai rata-rata minimal 7,0 (tujuh koma nol)

¹³ Dikutip dari dokumen SMK Putra Mahkota Kayen Pati, pada tanggal 14 Desember 2018

- d) Meningkatkan layanan kualitas pendidikan dan tata kelola sekolah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- e) Mempersiapkan peserta didik yang mampu mengembangkan diri mandiri secara profesional dengan keahliannya

3) Tujuan

Tujuan dari SMK Putra Mahkota adalah:

- a) Menghasilkan peserta didik yang beriman, berkemampuan IPTEK dan profesional serta berkemampuan mengembangkan diri terhadap tuntutan zaman
- b) Menghasilkan tenaga – tenaga terampil yang mampu berkiprah baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun internasional
- c) Membentuk peserta didik yang mampu berperilaku Islam baik dilingkungan maupun diluar lingkungan sekolah
- d) Membentuk tenaga kerja yang terampil, mandiri profesional dan mampu mengembangkan diri setelah terjun ditengah-tengah masyarakat.¹⁴

c. Susunan Pengurus Komite SMK Permata Nusantara

Ketua : Imam Syaikh, S.Pd.I

Sekretaris : Heru Purnomo

Bendahara : Indrawati, SE.

1) Bidang Pembangunan dan Sarana Prasarana : M Jakfar Shodik

¹⁴ Dikutip dari dokumen SMK Putra Mahkota Kayen Pati, pada tanggal 14 Desember 2018

- 2) Bidang Penelitian dan Pengembangan : M Cholik
- 3) Bidang Penggalangan Dana : Jarot Hardiyanto
- 4) Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi : Nanang Setiawan
- 5) Bidang Komunikasi Publik : Agus Suwarno.¹⁵

6. Tugas dan Kewajiban Komite Sekolah

- a. Menyusun AD dan ART Komite Sekolah.
- b. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- d. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.
- e. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai: kebijakan dan program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- f. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- g. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan di sekolah.

¹⁵ Dikutip dari dokumen SMK Putra Mahkota Kayen Pati, pada tanggal 14 Desember 2018

- h. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran Pendidikan di sekolah.¹⁶

7. Uraian Tugas Komite Sekolah

a. Ketua:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban komite sekolah.
- 2) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas baik pengurus harian maupun pengurus bidang agar tercapai kinerja organisasi yang maksimal.
- 3) Menkoordinasikan dan mengkomunikasikan aspirasi dan kepentingan anggota komite dan masyarakat terkait dengan kebijakan pendidikan di sekolah.

b. Sekretaris:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pembuatan, pendistribusian, pengarsipan surat menyurat baik untuk kepentingan internal komite sekolah maupun eksternal.
- 2) Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan kelengkapan alat-alat administrasi yang diperlukan oleh komite sekolah.
- 3) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan sekretariat komite sekolah demi kelancaran organisasi dan pelayanan publik.

¹⁶ Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah

- 4) Bersama-sama ketua dan ketua bidang menyusun laporan penyelenggaraan komite baik laporan akhir semester maupun laporan akhir tahun.
- 5) Membuat notulen pada setiap rapat baik rapat terbatas, rapat paripurna, maupun rapat luar biasa.

c. Bendahara;

- 1) Menerima dan membukukan sumbangan baik yang berasal dari orang tua maupun pihak lain ke dalam kas komite sekolah.
- 2) Dengan persetujuan ketua komite sekolah dan/atau kepala sekolah mengeluarkan dan membukukan keuangan ke dalam kas komite sekolah.
- 3) Membuat laporan secara periodik baik laporan bulanan, akhir semester, akhir tahun, maupun laporan keuangan lain yang dianggap perlu oleh komite sekolah maupun pihak sekolah.

d. Bidang Pembangunan dan Sarana Prasarana:

- 1) Bersama-sama dengan komponen sekolah melakukan analisis kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan baik terkait langsung dengan proses belajar mengajar maupun tidak.
- 2) Menelaah dan meneliti analisis pembiayaan yang diajukan oleh sekolah dalam rangka pengadaan sarana prasarana dan pembangunan fisik yang didanai komite sekolah.

- 3) Bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik, baik yang dilakukan oleh sekolah dan/atau komite sekolah yang pendanaannya melibatkan komite sekolah.
- 4) Bersama-sama Bidang Penggalangan Dana dan Bidang Komunikasi Publik secara aktif mengkomunikasikan kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk membantu pengadaan sarana prasarana tersebut.

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan:

- 1) Melakukan penelitian terhadap arah pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pendidikan di sekolah.
- 2) Bersama-sama pihak sekolah memetakan potensi orang tua/wali murid berdasarkan taraf ekonomi dan pendidikan yang dapat digunakan sebagai pijakan pengambilan keputusan baik oleh sekolah dan/atau komite sekolah terkait dengan besarnya partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung proses pendidikan di sekolah.
- 3) Bersama-sama pihak sekolah memetakan potensi siswa yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan jenis dan sistem pembelajaran yang dapat memaksimalkan potensi siswa tersebut.

- 4) Bersama-sama pihak sekolah memetakan potensi dan kekurangan guru yang nantinya digunakan sebagai pijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru untuk memenuhi kriteria tenaga kependidikan yang diinginkan.
- 5) Bersama-sama pihak sekolah mengamati kebutuhan, jenis dan jumlah pegawai yang akan mendukung proses belajar mengajar sehingga tercapai sebuah pelayanan pendidikan yang prima.

f. Bidang Kerjasama:

- 1) Secara aktif melakukan komunikasi dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga pendidikan lain guna pengembangan sistem dan tenaga kependidikan di sekolah.
- 2) Secara aktif melakukan komunikasi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka menjalin kerjasama untuk pengembangan pendidikan vokasional, *on the job training*, kunjungan industri, dll.

g. Bidang Penggalangan Dana:

Bersama-sama bendahara komite sekolah mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka menggalang dana baik dari masyarakat, lembaga pemerintahan maupun swasta, dunia industri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

h. Bidang Komunikasi Publik:

- 1) Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan keberadaan komite sekolah dan program-programnya kepada masyarakat

dalam rangka mencari dukungan dan mengeliminasi adanya persepsi yang tidak benar tentang komite sekolah.

- 2) Bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain mengkomunikasikan keberadaan sekolah kepada pihak-pihak lain dalam rangka mencari dukungan dan berkenaan dengan sistem pendidikan, sarana prasarana pendidikan, maupun hal-hal lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses pendidikan di sekolah.¹⁷

B. Deskripsi Data

1. Perencanaan program komite sekolah di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, sebaiknya perlu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan terlebih dahulu, sehingga upaya tersebut dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang dilakukan oleh komite sekolah dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk melihat potensi keberhasilan dan kegagalan setelah melaksanakan program kerja.

Untuk perencanaan, ada dua hal penting yang dilakukan oleh komite sekolah di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan, yaitu analisis kebutuhan untuk kebutuhan yang dilakukan selama setahun mendatang dan membuat program kerja. Di SMK Permata Nusantara Gabus Pati

¹⁷ Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah

dalam perencanaan, setiap awal tahun kita selalu melakukan rembukan bersama dengan ketua yayasan, kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan. Kira-kira apa kebutuhan mereka yang akan dilakukan selama 1 tahun yang akan datang.¹⁸ Dari situlah program kerja yang nantinya akan digunakan selama satu tahun Pernyataan diatas senada dengan penuturan kepala sekolah dalam salah satu waancara, yaitu.

Setiap awal tahun, ketika SMK Permata Nusantara Gabus Pati melakukan rapat kerja (RAKER) kami selalu melibatkan komite sekolah untuk membantu menganalisa kebutuhan lembaga selama satu tahun kedepan dan kemudian membuat program kerja dari hasil analisis kebutuhan tersebut. Peran komite sekolah yang paling besar disini adalah pengadaan sarana dan prasarana seperti penambahan gedung dan fasilitas pembelajaran yang mendorong efektifitas pembelajaran peserta didik.¹⁹

Dalam mendorong efektifitas pembelajaran sarana prasarana yang dimiliki oleh SMK Se-Kabupaten Pati Selatan sebagai berikut Komite sekolah SMK Se-Kabupaten Pati Selatan. Sebagaimana komite sekolah SMK Permata Nusantara Gabus Pati tidak hanya membangun SDM guru, tetapi membangun SDM peserta didik. Yang merupakan salah satu kunci dimana lembaga pendidikan berhasil mencetak peserta didik yang bermutu atau tidak. Jikalau SDM guru dan SDM peserta didik meningkat maka

¹⁸ Hasil wawancara individu dengan H. Basuni Ghofur, ketua komite sekolah SMK Permata Nusantara Gabus Pati, pada tanggal 17 Desember 2018

¹⁹ Hasil wawancara individu dengan H. Basuni Ghofur, ketua komite sekolah SMK Permata Nusantara Gabus Pati, pada tanggal 17 Desember 2018

secara otomatis 8 (delapan) SNP yang merupakan acuan/standar mutu pendidikan akan mudah tercapai.²⁰

Begitu juga dengan sarana dan prasana, dalam hal ini kepala sekolah juga selalu menambah sarana prasana yang menjadi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah selalu berusaha untuk memfasilitasi guru dalam mengajar dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Hal ini senada dengan penuturan kepala SMK Tarruna Bangsa Gabus Pati bahwa sarana prasana memang bukan kunci untuk meningkatkan pendidikan. Akan tetapi sarana dan prasana merupakan salah satu pendukung kunci dalam suksesnya pembelajaran. Semua ini tidak terlepas dari kebutuhan guru dan peserta didik. Sehingga sarana dan prasarana harus selalu ditingkatkan. Usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana.²¹

Disinilah peran komite sekolah yang langsung mengkomunikasikannya dengan ketua yayasan yang kemudian akan mencari solusi untuk kebutuhan kepala sekolah. SMK Tarruna Bangsa Gabus Pati Ketika membutuhkan pengadaan untuk sarana dan prasarana maka saya selaku ketua komite sekolah mengkomunikasikan hal tersebut

²⁰ Hasil wawancara individu dengan H. Basuni Ghofur, ketua komite sekolah SMK Permata Nusantara Gabus Pati, pada tanggal 17 Desember 2018

²¹ Hasil wawancara individu dengan Sunariyadi, S.Pd. ketua komite sekolah SMK Taruna Bangsa Gabus Pati, pada tanggal 19 Desember 2018

kepada komite sekolah khususnya untuk merealisasikan penambahan sarana dan prasarana.²²

Dalam aktifitasnya komite sekolah selalu menjadi mediator antara kepala sekolah dan ketua yayasan untuk mengkomunikasikan semua kebijakan yang telah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh kepala sekolah dan pengelola pendidikan. Kemudian komite sekolah menyampaikannya kepada ketua yayasan. Komite sekolah SMK Tarruna Bangsa Gabus Pati dalam perannya didalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya adalah sebagai mediator antara kepala sekolah dan ketua yayasan. Hal ini dilakukan karena dalam pengambilan keputusan kepala sekolah harus mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada ketua yayasan, kedekatan antara kami dan ketua yayasan menjadi lebih mudah untuk mengkomunikasikan semua apa yang menjadi kebutuhan kepala sekolah SMK Se-Kabupaten Pati Selatan.²³

Pada saat rapat perencanaan SMK Tarruna Bangsa Gabus Pati disampaikan, jika ada perubahan dari rencana awal kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan ketua komite, tanpa harus mengundang semua pengurus. Wujud dari komite sekolah memberikan otonomi profesional kepada guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya sesuai kaidah dan kompetensi guru adalah bahwa komite sekolah tidak pernah mencampuri pelaksanaan proses pembelajaran disekolah, bahkan komite

²² Hasil wawancara individu dengan Sunariyadi, S.Pd. ketua komite sekolah SMK Taruna Bangsa Gabus Pati, pada tanggal 19 Desember 2018

²³ Hasil wawancara individu dengan Sunariyadi, S.Pd. ketua komite sekolah SMK Taruna Bangsa Gabus Pati, pada tanggal 19 Desember 2018

sekolah tidak pernah membicarakan pelaksanaan pembelajaran didalam kelas, semua diserahkan tanggung jawab kepada kepala sekolah.²⁴

Demikian juga dalam hal komite sekolah memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dan kuratif dalam penyebarluasan narkoba di sekolah komite mendukung, namun pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Komite sekolah sudah mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama pihak sekolah, namun masalah-masalah yang diidentifikasi masih terbatas masalah non akademik seperti masalah pendanaan, masalah ketertiban siswa dan masalah pengembang sarana prasarana sekolah, sedangkan masalah akademik baru sebatas upaya bagaimana siswa kelas 3 bisa lulus 100 %, masalah akademik yang menyangkut proses dan mutu pembelajaran di kelas tidak pernah dibicarakan.

Masalah pendanaan (sebelum pemerintah memberikan dana BOS yang mencukupi) diselesaikan dengan mencari dukungan dana dari orang tua wali murid, baik untuk les kelas 3 maupun untuk pengembangan gedung. Secara umum peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*Supporting Agency*) di tiga banyak memberikan dukungan, baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, walaupun demikian sudah ada komite sekolah yang membantu tenaga dan peralatan dengan melatih tari dan ekstrakurikuler karawitan di rumah salah satu pengurus komitenya.

²⁴ Hasil wawancara individu dengan Sunariyadi, S.Pd. ketua komite sekolah SMK Taruna Bangsa Gabus Pati, pada tanggal 19 Desember 2018

Hal ini sejalan dengan pendapat Fattah yang menyatakan bahwa: “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mempunyai tujuan agar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat atau local *stakeholders* mempunyai keterlibatan yang tinggi Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (*Controlling Agency*) Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*Controlling Agency*) termasuk dalam kategori rendah”. Komite sekolah belum melakukan pemantauan secara maksimal terhadap pelaksanaan pengelolaan sekolah untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sekolah, maupun kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ketua Komite Sekolah SMK Nurul Qur'an Jaken Pati bahwa SMK Nurul Qur'an Jaken Pati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran (*output*) pendidikan maupun dalam pengawassan program sekolah yang meliputi: pengawasan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan belum dilakukan secara proporsional. Hal ini terjadi karena pengurus komite sekolah yang ada lebih bersifat pasif, mereka datang ke sekolah hanya bila diundang oleh pihak sekolah dan rata-rata hanya 2 (dua) kali dalam satu tahun.²⁵

²⁵ Hasil wawancara individu dengan Ahmad Baidlowi, Ketua komite sekolah SMK Nurul Qur'an Jaken Pati, pada tanggal 20 Desember 2018

Dengan demikian dapat dideskripsikan bahwa pertemuan/rapat antara pengurus komite sekolah sendiri juga belum dilakukan secara rutin. Pengawasan keuangan secara berkala telah dilakukan oleh ketua komite sekolah, dengan membubuhkan tandatangan pada laporan penggunaan keuangan. Dalam hal komite sekolah menerima laporan dari kepala sekolah yang berisi hasil evaluasi pengelolaan sekolah setiap akhir semester dilakukan secara tertulis, sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendidikan dari kepala sekolah yang disampaikan kepada komite dalam rapat dengan dewan guru dilaksanakan hanya satu kali bersamaan dengan perencanaan program sekolah. Hal ini menunjukkan peran komite sebagai badan pengontrol masih rendah.

Dengan demikian perencanaan program komite sekolah merupakan salah satu fungsi dan peran untuk menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu partisipasi komite sekolah dapat dikatakan sebagai suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat baik yang bersifat dukungan material maupun non material dari seluruh anggota dan kepengurusannya, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan/pengevaluasian pendidikan demi kemajuan mutu sekolah.

2. Pelaksanaan program komite sekolah di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan

Setelah menyusun sebuah perencanaan maka komite sekolah melakukan pelaksanaan. Pelaksanaan yang dilakukan oleh komite sekolah tidak lepas dari perencanaan yang telah disusun sejak awal untuk program kerja selama setahun. Kinerja komite sekolah di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan sampai detik ini cukup optimal. Terlihat dari perubahan-perubahan yang terjadi di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan, mulai dari pembangunan yang terus bertambah dan memenuhi standar sarana prasarana pendidikan. Dalam pelaksanaan kinerja komite sekolah sangat optimal, saya terjun langsung kelapangan untuk melihat proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah disusun oleh pengurus komite sekolah yang disetujui ketua yayasan dan kepala sekolah. Salah satu contohnya adalah ketika SMK mendapatkan dana tambahan untuk penambahan gedung.²⁶

Kinerja komite sekolah sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi masyarakat tidak akan pernah merasa puas apabila kebutuhan masyarakat belum terpenuhi. Pelaksanaan pembangunan Gedung merupakan salah satu jawaban yang diberikan oleh Lembaga pendidikan dan komite sekolah untuk membuat masyarakat lebih percaya lagi bahwa SMK Se-Kabupaten Pati Selatan terus berbenah dan meningkatkan mutu pendidikannya.

Pembangunan merupakan salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh komite sekolah dan lembaga pendidikan. Karena diketahui

²⁶ Hasil wawancara individu dengan Ahmad Baidlowi, Ketua komite sekolah SMK Nurul Qur'an Jaken Pati, pada tanggal 20 Desember 2018

bahwa gedung yang megah merupakan salah satu daya tarik bagi masyarakat atau umpan balik dari kepercayaan masyarakat kepada kami selaku pembantu lembaga pendidikan.²⁷

Sekarang SMK lagi proses penambahan bangunan. Peserta yang semakin meningkat setiap tahunnya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang ada. Salah satunya ya bangunan tersebut. Kalau siswa banyak sementara bangunan masih tetap seperti dulu. Jadi kasian siswa kita, oleh karena itu pengelola lembaga pendidikan dengan melibatkan komite sekolah menambah bangunan SMK Se-Kabupaten Pati Selatan ini.²⁸

Perencanaan yang dilakukan oleh komite sekolah benar-benar dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Salah satu contohnya adalah terkait proses pelaksanaan standar sarana dan prasarana pendidikan yang terus gencar dilakukan oleh pengelola pendidikan. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung (*Mediator Agency*) Peran komite sekolah sebagai badan penghubung (*mediator Agency*) termasuk dalam kategori cukup.

Komite sekolah telah melakukan kerja sama dengan masyarakat/orangtua/walimurid dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, demikian juga komite sekolah telah membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholders*

²⁷ Hasil wawancara individu dengan Ahmad Baidlowi, Ketua komite sekolah SMK Nurul Qur'an Jaken Pati, pada tanggal 20 Desember 2018

²⁸ Hasil wawancara individu dengan Ahmad Baidlowi, Ketua komite sekolah SMK Nurul Qur'an Jaken Pati, pada tanggal 20 Desember 2018

pendidikan disekitar sekolah, hal ini terbukti tidak ada keluhan dari masyarakat disekitar sekolah berkaitan dengan kegiatan sekolah, masyarakat disekitar sekolah telah ikut menjaga keamanan sekolah.²⁹ Komite sekolah bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industry berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, hal ini karena kurikulum di SMK terdapat materi siswa magang, sebagaimana dalam kurikulum SMK.³⁰

Dalam hal komite sekolah menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat dilakukan secara lisan dan disampaikan kepada sekolah oleh komite sekolah juga secara lisan di sampaikan pada saat rapat dengan pihak sekolah. Selama ini belum ada surat dari masyarakat maupun dari komite sekolah yang diajukan ke sekolah. Dalam hal menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah dilakukan bersama-sama dengan sekolah, tidak dilakukan sendiri oleh komite sekolah, hal ini terlihat dari setiap proposal yang di buat sekolah baik proposal untuk mendapatkan Beasiswa Siswa Miskin (BSM), proposal pengajuan dana pendamping BOS, proposal rehap gedung ataupun proposal

²⁹ Hasil wawancara individu dengan Ahmad Baidlowi, Ketua komite sekolah SMK Nurul Qur'an Jaken Pati, pada tanggal 20 Desember 2018

³⁰ Hasil wawancara individu dengan Ahmad Baidlowi, Ketua komite sekolah SMK Nurul Qur'an Jaken Pati, pada tanggal 20 Desember 2018

tambahan ruang harus selalu mendapat persetujuan (ditandatangani) oleh ketua komite sekolah.³¹

Selama ini komite sekolah belum menyampaikan usulan langsung kepada pemerintah daerah, hal ini karena mekanisme pengajuan proposal ke Pemda harus melalui sekolah dengan persetujuan komite sekolah. Secara keseluruhan peran komite sekolah sebagai badan penghubung termasuk dalam kategori cukup. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di tiga SMK.

Hal ini terjadi dari pihak sekolah sendiri, belum semua sekolah memberdayakan komite secara optimal, hal ini nampak adanya pendapat dari salah satu kepala sekolah yang mengatakan bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir ini komite sekolah tidak diberdayakan karena sekolah tidak menarik uang/iuran dari orang tua/wali murid, pendapat ini menganggap bahwa peran komite sekolah hanya sebatas dalam menggalang dana dari orang tua/wali murid.³²

Dalam FGD (*Focus Group Discussion*) tidak membenarkan jika komite sekolah selama 2 tahun terakhir ini tidak diberdayakan, karena di sekolah kami komite sekolah terlibat dalam hampir semua kegiatan sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah. Sebagai contoh dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan komite

³¹ Hasil wawancara individu dengan M Subhan, SH., ketua komite sekolah SMK Al-Falah Winong Pati, pada tanggal 21 Desember 2018

³² Hasil wawancara individu dengan M Subhan, SH., ketua komite sekolah SMK Al-Falah Winong Pati, pada tanggal 21 Desember 2018

sekolah terlibat aktif melatih dan memfasilitasi dengan peralatan yang digunakan, karena sekolah tidak mempunyai perangkat karawitan maka karawitan dilaksanakan di rumah salah seorang anggota komite.³³

Walaupun komite tidak menggalang dana dari orang tua/wali murid tetapi peran komite sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah kami. Saat ini bersama komite kami sedang mengadakan pendekatan kepada pemerintah, dalam hal ini kepala desa untuk menambah area tanah sekolah dari kas desa, karena tanah sekolah kurang luas. Salah satu faktor penyebab komite sekolah belum melaksanakan perannya secara optimal baik sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol maupun sebagai mediator adalah komite sekolah tidak mengetahui peran dan fungsinya, hal ini terlihat dari hasil wawancara FGD tanggal 17 Desember 2018 dengan pengurus komite, ketika ditanya tentang peran dan fungsi komite, rata-rata mereka tidak mengetahuinya.

Berikut ini salah satu hasil wawancara dengan komite sekolah, 7 Sebagai pengurus komite sekolah kami tidak mengetahui apakah peran dan fungsi komite sekolah, kami belum pernah mengikuti sosialisasi tentang komite sekolah. Pengurus komite menjadi anggota BP3, sejak tahun 2010, pada saat itu semua anggota BP 3 menjadi pengurus komite, sampai sekarang saya masih menjadi pengurus komite. Pendapat ini sesuai dengan hasil FGD yang menyatakan bahwa rata-rata pengurus komite sekolah

³³ Hasil wawancara individu dengan M Subhan, SH., ketua komite sekolah SMK Al-Falah Winong Pati, pada tanggal 21 Desember 2018.

tidak mengetahui tugas pokok dan fungsinya sebagai komite sekolah, sehingga sekolah perlu memberikan penerangan/pembekalan kepada pengurus komite supaya komite sekolah dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.³⁴

Sehingga selama ini memang pihak sekolah belum pernah mengadakan sosialisasi kepada pengurus komite tentang tugas dan fungsi komite. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu ketua komite yang menunjukkan bahwa pernah ada sosialisasi dari Kabupaten tentang komite sekolah kepada ketua ketua komite di Kecamatan Musuk, namun dari pihak sekolah maupun komite tidak mensosialisasikan kepada publik.

3. Evaluasi program komite sekolah di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan

Evaluasi merupakan bentuk kegiatan untuk mengetahui apakah pelaksanaan yang dilakukan berjalan dengan maksimal dan sesuai target atau tidak. Komite sekolah selaku pembantu kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan juga mempunyai peran dalam mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan setelah setahun.

Artinya setelah komite sekolah menyusun perencanaan pasti komite sekolah akan melaksanakan perencanaan tersebut. Akan tetapi tidak hanya sampai disitu. Ada satu pekerjaan lagi yang dilakukan oleh komite sekolah yaitu evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh komite

³⁴ Hasil wawancara individu dengan M Subhan, SH., ketua komite sekolah SMK Al-Falah Winong Pati, pada tanggal 21 Desember 2018

sekolah sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dilaksanakan berhasil atau tidak.³⁵

Komite sekolah berperan aktif dalam mengevaluasi semua kinerja pengelola SMK Se-Kabupaten Pati Selatan. Ada dua evaluasi yang dilakukan oleh komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, yaitu evaluasi kondisional dan evaluasi tahunan. Evaluasi selalu dilakukan di SMK, dalam praktiknya kami melakukan evaluasi sebanyak dua kali dalam setahun, evaluasi yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dan evaluasi tahunan. Evaluasi yang pertama maksudnya adalah komite dalam mengevaluasi tidak harus dalam kondisi formal atau dalam rapat yang ditentukan oleh komite maupun kepala sekolah. sedangkan evaluasi yang kedua dilakuakn pada akhir tahun atau sebelum dimulainya tahun ajaran baru.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua komite sekolah SMK Se-Kabupaten Pati Selatan diatas, maka evaluasi yang dilakukan oleh komite sekolah terdiri dari du tahap, yaitu:

a. Evaluasi kondisional

Evaluasi ini dilakukan tidak mengenal waktu artinya menyesuaikan dengan gejala atau masalah yang terjadi dilembaga pendidikan. Bisa satu minggu sekali, satu bulan sekali, dan bias satu semester sekali. Evaluasi ini dilakukan apabila ada masalah atau

³⁵ Hasil wawancara individu dengan M Subhan, SH., ketua komite sekolah SMK Al-Falah Winong Pati, pada tanggal 21 Desember 2018

³⁶ Hasil wawancara individu dengan M Subhan, SH., ketua komite sekolah SMK Al-Falah Winong Pati, pada tanggal 21 Desember 2018

problem yang secara mendesak harus diselesaikan segera, sehingga evaluasi harus secepatnya dilakukan agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan menjadi masalah yang lebih besar.

Dalam evaluasi ini komite sekolah bertugas untuk mencari solusi dan pemecahan masalah dengan melibatkan ketua Yayasan dan kepala sekolah. Metode yang digunakan adalah dengan berkordinasi terlebih dahulu dengan ketua yayasan dan kepala sekolah kemudian menganalisa masalah yang terjadi selanjutnya mengidentifikasi masalah tersebut dan mencari solusinya.

b. Evaluasi tahunan

Evaluasi ini dilakukan setiap akhir tahun atau menjelang tahun ajaran baru. Evaluasi ini dilakukan secara umum, yaitu melibatkan ketua yayasan, kepala sekolah, guru-guru, kaprodi, staf sekolah, wali murid dan partisipan sekolah. Metode yang digunakan secara tertulis yang disampaikan didepan umum ketika mengadakan acara akhirussanah atau pelepasan wisuda peserta didik kelas XII.

Selanjutnya, dipaparkan temuan penelitian kasus temuan penelitian di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan Perencanaan program komite sekolah Perencanaan program komite sekolah SMK Se-Kabupaten Pati Selatan dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan, meliputi;

- 1) Penetapan perencanaan awal tahun,
- 2) Perencanaan kebijakan selama satu tahun,

- 3) Perencanaan program kerja peningkatan SDM guru,
- 4) Perencanaan anggaran,
- 5) Perencanaan penambahan gedung dan perbaikan gedung, dan
- 6) Standar kebutuhan tujuan pendidikan.

Pelaksanaan program komite sekolah Pelaksanaan program komite sekolah SMK Se-Kabupaten Pati Selatan meliputi

- 1) pelaksanaan kegiatan program kerja,
- 2) melaksanakan peningkatan SDM guru (berbentuk workshop/pelatihan),
- 3) pelaksanaan penambahan gedung dan perbaikan gedung, dan
- 4) Pelaksanaan standar kebutuhan tujuan pendidikan.

c. Evaluasi program komite sekolah

Evaluasi program komite sekolah SMK Se-Kabupaten Pati Selatan Komite sekolah selaku pembantu kepala sekolah anggota komite yang lain, sehingga pernah ada sosialisasi tentang komite sekolah (kalau tidak salah tahun 2015) dari Kabupaten, yang diundang ketua komite beserta kepala sekolah SD/SMP/SMA/SMK se Kabupaten Pati, tetapi tidak kami tindak lanjuti dengan sosialisasi ke pengurus yang lain, karena tidak wajib.³⁷

Faktor lain yang menyebabkan komite sekolah belum melaksanakan perannya adalah rendahnya tingkat pendidikan pengurus

³⁷ Hasil wawancara individu dengan M Subhan, SH., ketua komite sekolah SMK Al-Falah Winong Pati, pada tanggal 21 Desember 2018

komite sekolah, dari 25 responden hanya 20% (5 orang) yang tingkat pendidikannya diatas SLTA (Diploma dan Sarjana), 20% lagi lulusan sekolah dasar dan rata-rata berpendidikan SLTA (52%) sehingga mereka pasif, hanya datang kesekolah bila ada undangan saja, ada kesan bahwa keberadaan komite sekolah hanya merupakan badan pelengkap yang harus ada di sekolah, hal ini terlihat bahwa banyak pengurus komite yang menjadi pengurus sudah lebih dari 10 tahun, bahkan sejak menjadi anggota BP3 sampai sekarang masih menjadi pengurus.³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya koordinasi inilah yang masih menjadi ganjalan mengenai peranan komite sekolah kedepannya. Program pemberdayaan Komite Sekolah dapat dinilai berhasil jika telah tercapai beberapa indikator sebagai berikut: *Pertama*, proses pembentukan Komite Sekolah tidak lagi dilakukan secara instan, melainkan melalui proses dan mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan AD/ART. *Kedua*, Komite Sekolah harus benar-benar telah menjadi lembaga masyarakat yang mandiri, dengan melaksanakan prinsip manajemen yang demokratis, transparan, dan akuntabel. *Ketiga*, Komite Sekolah di masa depan benar-benar telah menjadi lembaga masyarakat yang diakui eksistensinya secara mantap oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Keempat*, Komite Sekolah di masa depan dapat menjalin

³⁸ Hasil wawancara individu dengan M Subhan, SH., ketua komite sekolah SMK Al-Falah Winong Pati, pada tanggal 21 Desember 2018

hubungan dan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. *Kelima*, tidak ada lagi Komite Sekolah “stempel” dan Komite Sekolah “eksekutor”. Dengan kata lain, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang berhasil dibentuk adalah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang memiliki semangat kemitraan dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan Sekolah. *Keenam*, Jika ada permasalahan antara satuan pendidikan Sekolah dan Komite Sekolah dapat diselesaikan secara mandiri oleh Komite satuan pendidikan Sekolah. *Ketujuh*, Secara bertahap diharapkan agar Komite Sekolah segera dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan sekolah masing-masing.

4. Faktor pendukung dan penghambat manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kinerja di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan

a. Faktor Pendukung

Komite sekolah akan dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru dan siswa untuk belajar sebanyak mungkin sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif.

Tahapan perencanaan telah diupayakan sebuah solusi oleh Kepala Sekolah dengan mencari informasi dari berbagai sumber mengenai tugas yang paling pokok dari komite sekolah. Selain itu saya juga bekerjasama dengan majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Pati untuk menyamakan persepsi antara sekolah kami dengan sekolah lain agar tidak terjadi ketimpangan yang lebih berat lagi.³⁹

Pengetahuan mengenai peranan pokok komite sekolah yang telah dirumuskan oleh pemerintah masih terus berkembang. Sehingga perlu pengkajian dan penelaahan lebih jauh lagi. Pengorganisasian Manajemn Pemberdayaan Komite Sekolah Solusi untuk hambatan yang terdapat dalam pengorganisasian lebih banyak dilakukan oleh Ketua komite. Menurut Bapak Irfan Pujiyanto komite sekolah sendiri juga harus lebih proaktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat yang di luar Sekolah perlu mendapatkan informasi. Ini tidak akan terjadi dengan baik jika hanya mengandalkan papan pengumuman saja. Kami selaku komite Sekolah juga perlu berperan aktif menbnyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat.⁴⁰

Komite Sekolah telah melakukan tugas sekaligus program kerjanya dalam hal hunungan kemasyarakatan. Ini lah yang dapat dijadikan solusi dalam penyampaian informasi. Komite Sekolah telah

³⁹ Wawancara dengan Imam Syaekhu, S.Pd.I., ketua komite sekolah SMK Putra Mahkota Kayen Pati, pada tanggal 23 Desember 2018

⁴⁰ Wawancara dengan Imam Syaekhu, S.Pd.I., ketua komite sekolah SMK Putra Mahkota Kayen Pati, pada tanggal 23 Desember 2018

mengupayakan dana yang dapat digunakan untuk keperluan pengelolaan sekolah. Baik melalui pengajuan proposal bantuan, maupun dari kesepakatan dengan wali murid.

Menurut Kepala SMK Putra Mahkota komite sekolah telah menempuh jalan ini untuk mencari solusi pelaksanaan program yang belum sempurna. Karena Komite telah mencari upaya dalam memenuhi kebutuhan akan dana. Mulai dari proposal bantuan kepada alumni, maupun kepada pihak ketiga, selain itu juga mengupayakan adanya kesepakatan dengan wali murid.⁴¹

Pendanaan yang belum mencukupi kemudian disiasati oleh komite untuk menggunakannya dalam kegiatan yang paling mendesak. Untuk kegiatan yang masih dapat ditanggihkan akan direncanakan ulang pada periode berikutnya. Terkait dengan hal tersebut, dalam Evaluasi Manajemen Pemberdayaan Komite Sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah sendiri. Menurut beliau, evaluasi memang harus dilakukan pada setiap program. Namun demikian bentuk evaluasi dapat diringkas atau disederhanakan sesuai kebutuhan.

Sehingga evaluasi terhadap program yang bersifat rutin, tetap dilaksanakan, namun bentuknya lebih sederhana. Yakni dilakukan dalam rapat rutin setiap bulan dengan komite sekolah. Pada rapat tersebut, kami memberikan waktu khusus untuk mengevaluasi sekilas mengenai program-program yang telah berjalan. Lalu kami akan

⁴¹ Wawancara dengan Imam Syaekhu, S.Pd.I., ketua komite sekolah SMK Putra Mahkota Kayen Pati, pada tanggal 23 Desember 2018

mencatat dalam notulen, sehingga evaluasi telah tercatat secara resmi.⁴²

Evaluasi pada akhir periode kepengurusan tetap dilaksanakan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban dari pengurus komite sekolah. Melalui laporan inilah Kepala Sekolah akan mengetahui program yang perlu direncanakan ulang, dipertahankan atau dibuang saja. Dalam pengadaan sarana prasarana. Komite sekolah telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah agar siswa kedepannya dapat belajar di sekolah dengan nyaman dan tenang serta dapat menerima proses pembelajaran dengan baik.

Komite sekolah melakukan upaya untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh sekolah untuk memberikan kenyamanan bagi siswa supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal serta peningkatan mutu pendidikan dapat terpenuhi. Upaya yang dilakukan oleh komite sekolah antara lain: (1) Menganalisa kebutuhan pendidikan dan menetapkan program untuk pengadaan sarana dan prasarana sebagai program sekolah untuk meningkatkan kualitas siswa, (2) Cepat dan tanggap dalam menerima masukan dari orang tua siswa untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah, (3) Melakukan rapat dengan elemen sekolah untuk menentukan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh sekolah, (4)

⁴² Wawancara dengan Imam Syaekhu, S.Pd.I., ketua komite sekolah SMK Putra Mahkota Kayen Pati, pada tanggal 23 Desember 2018

Mendahulukan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh sekolah berdasarkan keputusan hasil rapat, (5) Menyusun anggaran dana serta mengklarifikasi sumber dana yang akan diperoleh, (6) Memberikan motivasi kepada guru dan siswa untuk lebih giat belajar serta dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh sekolah.

Terkait dengan hal tersebut, faktor pendukung komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana merupakan faktor terpenting penentu ada atau tidaknya pengadaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan oleh komite sekolah. Peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah merupakan penentu keefektifan pembelajaran di sekolah serta tingkat kenyamanan siswa dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Terkait dengan hal tersebut faktor pendukung komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana di Sekolah adalah segala sesuatu yang menjadi penyebab kelancaran dalam pengadaan sarana dan prasarana di sekolah.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat komite sekolah dalam pengadaan sarana prasarana. Faktor penghambat merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Selama ini dikeluhkan bahwa mutu pendidikan nasional rendah karena dana yang tidak mencukupi, anggaran untuk pendidikan masih terlalu rendah. Padahal kalau mau belajar dari bangsa-bangsa yang maju bagaimana mereka membangun,

justru mereka berani “secara nekad” menempatkan anggaran untuk pembiayaan pendidikan melebihi keperluankeperluan yang lain.

Pada umumnya ada dua hal yang menjadi titik kelemahan, yaitu yang bersifat internal dan eksternal. Kelemahan internal adalah kelemahan yang berada di dalam perpustakaan, kelemahan yang biasanya dihadapi tersebut meliputi: (a) sumber daya perpustakaan, (b) administrasi, (c) manajemen. Sedangkan kelemahan eksternal adalah hambatan dan kesulitan yang berada di luar sekolah, yakni yang dihadapi dan dirasakan oleh siswa. Kelemahan eksternal tersebut meliputi: (a) kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah, (b) minimnya dana yang dimiliki oleh sekolah, (c) kurangnya motivasi dari pihak sekolah dan kurangnya kesadaran dari pihak siswa.

Hal-hal yang di temukan adanya permasalahan itu diantaranya yaitu minimnya dana yang dimiliki oleh sekolah akan menghambat komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, jika kebutuhan yang diperlukan oleh siswa berjumlah banyak namun dana yang ada tidak memadai, maka komite sekolah juga tidak bisa secepatnya memenuhi kebutuhan sekolah yang akan berdampak pada ketidak nyamanan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang berakibat tidak efektifnya proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

Hal ini menjadi faktor penghambat komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana, karena dengan demikian dapat membuat siswa tidak bisa berkonsentrasi yang berdampak pada ketidak efektifan proses pembelajaran. Beberapa hal yang menjadi hambatan penunjang peoses pembelajaran di sekolah oleh komite sekolah, faktor penghambat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran karena minimnya persediaan dana yang dimiliki oleh sekolah, hal ini sangat menghambat komite sekolah karena komite harus menggalang dana terlebih dahulu untuk membeli kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.

Faktor-faktor lainnya yang masalah yang ditemui di Sekolah yaitu selain kendala minimnya dana yang dimiliki oleh sekolah, adanya pro dan kontra antara pihak sekolah dengan orang tua siswa yang menginginkan semua masukan supaya dipenuhi oleh komite sekolah. Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menjadi faktor penghambat komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

Berdasarkan masalah yang ditemui di sekolah, terungkap bahwa adanya pro dan kontra antara sekolah dengan pihak orang tua siswa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah sehingga komite sekolah perlu melakukan pendekatan dan rapat ulang dengan anggota sekolah dan orang tua siswa. Kurang adanya kesadaran siswa dan motivasi guru agar lebih

meningkatkan pembelajaran serta dapat memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang ada juga dapat menjadi faktor penghambat komite sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah yang telah direncanakan.

Selain itu juga masih belum terlaksana dengan baik dalam hal berikut:

- 1) Proses pembentukan komite sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite sekolah dibentuk untuk tujuan mediasi antara sekolah dengan masyarakat. Namun kenyataannya masih terdapat asumsi bahwa komite sekolah hanyalah sebagai organisasi untuk membantu mencari bantuan dana bagi pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu pembentukan komite sekolah semestinya dilakukan secara demokratis oleh para Stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- 2) Komite sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan belum memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga. Sebagai sebuah lembaga sudah semestinya melengkapi dirinya dengan AD/ART. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat 3 dinyatakan “Komite sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan,

arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.”⁴³

- 3) Belum adanya pemberdayaan komite sekolah yang dilakukan secara berkelanjutan. Mulai dari tingkat satuan pendidikan hingga pengurus Dewan pendidikan pada tingkat Nasional. Dewan pendidikan pada tingkatan di atas satuan pendidikan belum melakukan tugasnya untuk minimal menyamakan persepsi mengenai tugas dan fungsi pokok komite di tingkat sekolah. Artinya Komite sekolah di SMK se-Kabupaten Pati Selatan selama ini justru berkonsultasi dengan Majelis Dikdasmen sebagai Yayasan yang menjadi induk sekolah tersebut. Padahal Dewan Pendidikan di tingkat Kabupatek Pati pun ada.”
- 4) Hambatan dalam Perencanaan Manajemen Pemberdayaan Komite Sekolah Menurut Kepala erencanaan dalam manajemen pemberdayaan komite sekolah terdapat dalam keterbatasan pengetahuannya dlaam hal tugas dan fungsi komite sekolah yang paling tepat. Sehingga pemberdayaan akan lebih optimal. Selama ini Kepala Sekolah menyadari masih belum maksimal dalam pemberdayaan komite. Selama ini komite lebih banyak kami ajak membahas mengenai dana yang dibutuhkan unutk kelangsungan

⁴³ Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat 3

pengelolaan pendidikan. Adapun fungsi lainnya belum dapat kali laksanakan dengan baik”⁴⁴.

- 5) Hambatan dalam Pengorganisasian Manajemen Pemberdayaan Komite Sekolah Hambatan dalam pengorganisasian berasal dari keterbatasan Sekolah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Proses sosialisasi mengenai komite sekolah baru terbatas dilaksanakan melalui penempelan pamflet atau tulisan-tulisan mengenai komite sekolah di papan pengumuman yang berada di bagian depan Sekolah. Karena selama ini sosialisasi mengenai adanya komite sekolah baru terbatas dengan penempelan tulisan-tulisan di papan pengumuman yang terletak di bagian depan sekolah. Dengan hal ini informasi baru menjangkau wali murid saja. Untuk masyarakat umum belum dapat dilaksanakan.”⁴⁵

Hambatan ini juga dikonfirmasi oleh Ketua Komite adalah sosialisasi yang dilaksanakan pihak Sekolah masih terbatas pada penempelan brosur di papan pengumuman. Ini masih kurang optimal mengingat kondisi masyarakat sekitar pasti belum mampu mengaksesnya. Kecuali bagi mereka yang memang masih memiliki anak yang bersekolah disana. Itupun tidak semuanya membaca papan pengumuman. Hambatan yang paling pokok dalam

⁴⁴ Wawancara individu dengan Kepala SMK Nurul Qur'an Jaken, pada tanggal 20 Desember 2018.

⁴⁵ Wawancara dengan Imam Syaekhu, S.Pd.I., ketua komite sekolah SMK Putra Mahkota Kayen Pati, pada tanggal 23 Desember 2018

pengorganisasian adalah upaya penyampaian informasi kepada masyarakat masih sangat terbatas”.⁴⁶

- 6) Hambatan dalam Pelaksanaan Manajemen Pemberdayaan Komite Sekolah Pelaksanaan manajemen pemberdayaan komite sekolah telah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah sejak penetapan pengurus komite sekolah. Kepala telah mengupayakan pembentukan komite sekolah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Komite sekolah yang telah kami bentuk belum sepenuhnya sempurna. Untuk ukuran sebuah organisasi masih diperlukan adanya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dan komite SMK se-Kabupaten Pati masih belum memilikinya. Ke depannya kami ingin untuk memperbaiki keorganisasiannya. Serta pelaksanaan tugas agar menjadi lebih lugas.⁴⁷

Belum semua program komite sekolah dapat terlaksana dengan baik. Sebagai contoh, rencana rehab ruang guru, kelas, dan kamar mandi baru dapat terlaksana pada bagian rehab kamar mandi saja. Dana yang terkumpul dari yang diupayakan oleh komite sekolah belum mencukupi untuk terlaksananya program tersebut secara keseluruhan.

⁴⁶ Wawancara dengan Imam Syaekhu, S.Pd.I., ketua komite sekolah SMK Putra Mahkota Kayen Pati, pada tanggal 23 Desember 2018

⁴⁷ Wawancara individu dengan Kepala SMK Nurul Qur'an Jaken, pada tanggal 20 Desember 2018.

7) Hambatan dalam Evaluasi Manajemen Pemberdayaan Komite Sekolah Evaluasi manajemen pemberdayaan komite sekolah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah terhambat dengan persoalan waktu. Untuk setiap program yang telah terlaksana, terdapat program yang tidak terevaluasi dengan baik. Bahkan memang terkesan senagaja untuk tidak dievaluasi karena telah menjadi rutinitas. Dengan alasan bahwa evaluasi yang dilakukan sebenarnya ada dua. Yakni setiap program dan setelah selesai periode. Untuk evaluasi setiap program, terkadang saya merasa tidak perlu untuk dievaluasi karena sudah rutinnnya kegiatan yang terlaksana itu. Ini adalah sebuah kesalahan. Namun, ketua komite tetap membiarkannya hingga berlarut-larut. Oleh karena itu, kegiatan yang bersifat rutin masih jarang dievaluasi. Misalnya kegiatan evaluasi belajar, penerimaan peserta didik baru, dan kegiatan kenaikan kelas. Kepala Sekolah lebih banyak mengevaluasi pada program-program yang sifatnya insidental, atau berkenaan dengan sarana fisik.⁴⁸

Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan pemaparan data sebelumnya, komite sekolah di SMK se-Kabupaten Pati Selatan sedang berjalan. Namun pengurus dan anggota komite sekolah relatif belum optimal dalam melaksanakan

⁴⁸ Wawancara dengan Imam Syaekhu, S.Pd.I., ketua komite sekolah SMK Putra Mahkota Kayen Pati, pada tanggal 23 Desember 2018

tugas dan fungsinya. Masih kurang dalam mendukung, mengontrol dan menjadi mediator antara pemerintah (sekolah) dengan masyarakat.

Sebagaimana pernyataan Hasbullah bahwa persoalan dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, dan dana juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

C. Analisis Data

1. Analisis Perencanaan Program Komite Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan

Berdasarkan temuan data, hasil wawancara dan observasi di lapangan terkait dengan perencanaan program komite sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan dapat dianalisis bahwa perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi program komite, yaitu dari manajemen peningkatan mutu sekolah. Salah satu wujud aktualisasi perencanaan program komite sekolah adalah dibentuknya suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 diterangkan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang

tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2006: 8). Kemudian pada pasal 56 ayat 3 diterangkan kembali bahwa Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan.

Perencanaan program kerja Komite Sekolah harus berkiblat pada keempat perannya. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, seefektif dan seefisien mungkin. Artinya Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan, seperti: mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumberdaya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah; menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan; pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah; menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah; memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maupun Kurikulu 2013

(K2013); memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran; memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM); memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah, memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS.

Perencanaan program komite dalam hal sebagai pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti: mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholders di lingkungan sekolah; mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu; memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah; mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, seperti; mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri dalam penyediaan sarana/prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu, dan ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan sekolah.

Perencanaan Komite Sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti: meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolahnya; mencari penyebab ketidakberhasilan belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Perencanaan program kerja komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti: melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu; membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholders pendidikan di sekitar sekolah; mengadakan penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain di luar sekolah untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah;

menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, dalam bentuk: menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari stakeholder pendidikan di sekitar sekolah; menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah sekitar sekolahnya. Perencanaan sangat penting dilakukan, karena tanpa adanya rencana berarti tidak ada tujuan yang dicapai, adanya rencana tidak ada pedoman pelaksanaan, sehingga banyak pemborosan, dan rencana merupakan dasar pengendalian, kerana tanpa adanya rencana pengendalian tidak dapat dilakukan.

Jika rencana program kerja Komite Sekolah sudah mencakup keempat peran tersebut di atas, maka dapat dikatakan perencanaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan sudah baik, tinggal bagaimana pelaksanaannya nanti, apakah dapat dilaksanakan sesuai rencana atau justru sebaliknya. Karena semua itu tergantung bagaimana Komite Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan, dan lingkungan sosial ekonomi yang mendukungnya.

Sesuai dengan pendapat G. Terry dalam Hasibuan bahwa “manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya. Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah organisasi, mulai dari perencanaan program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan program kerja, dan evaluasi program kerja, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.”⁴⁹

2. Analisis Pelaksanaan Program Komite Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan

Pelaksanaan merupakan realisasi rencana program kerja dalam bentuk kegiatan yang nyata. Dalam melaksanakan perannya sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency* dan *mediator agency*, komite sekolah dapat melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam tujuh fungsi komite sekolah yang dapat membantu peningkatan mutu di satuan pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan

⁴⁹ Hasibuan, Malayu, S.P, *Manajemen, dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi AKSARA, 2010.

mengenai kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Dalam proses pelaksanaan program kerja, ketua Komite Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan, masing-masing memiliki wewenang dalam bertindak sebagai pengarah dan pemberi motivasi agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan lancar. Pengarahan dalam proses pelaksanaan sangat penting, karena pengarahan yang dilakukan sebelum memulai bekerja, berguna untuk menekankan hal-hal yang perlu ditangani, urutan prioritas, prosedur kerja dan lainlainnya agar pelaksanaan pekerjaan dapat efektif dan efisien. Pengarahan yang dilakukan selama melaksanakan tugas bagi orang-orang yang terlibat dimaksudkan untuk mengingatkan ataupun meluruskan apabila terjadi penyelewengan atau penyimpangan.

Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, Komite Sekolah harus menyusun program kerja atau sebuah perencanaan program atau dalam hal ini Komite Sekolah membutuhkan pengelolaan yang baik agar

dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah program, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

3. Analisis Evaluasi Pelaksanaan Program Komite Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan

Sejalan dengan temuan data dan informasi terkait evaluasi program yang telah dilaksanakan oleh komite sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan, evaluasi program kerja Komite Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan, dilakukan untuk menilai semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu evaluasi juga dilakukan untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya suatu kegiatan Komite Sekolah dalam pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian dalam kegiatan Komite Sekolah berikutnya. Evaluasi yang harus dilakukan adalah evaluasi tentang seberapa jauh Komite Sekolah telah melaksanakan keempat perannya tersebut. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan umpan balik dalam merencanakan kegiatan yang akan datang.

Dalam melaksanakan evaluasi program kerja Komite Sekolah harus dilakukan oleh seluruh pengurus Komite Sekolah, agar permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program kerja dapat diketahui. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, perbaikan

dan pencarian solusi yang tepat dapat ditemukan dengan mudah. Pencarian solusi akan lebih mudah jika dilakukan Bersama-sama.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada anggota ke dalam program-program tertentu, pelaksanaan program kerja Komite Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan telah sesuai rencana yang ditetapkan, dan evaluasi dilakukan untuk menilai program kerja yang telah terlaksana apakah sudah sesuai dengan rencana. Kemudian dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan di SMK se-Kabupaten Pati Selatan juga sudah cukup baik, Pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dilaksanakan dengan mengoptimalkan empat peran komite sekolah, yakni: Komite Sekolah bertindak sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; pendukung (*supporting agency*) baik yang berujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan mediator (*mediator agency*) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan atau mediator antara masyarakat dengan satuan pendidikan.

Dengan demikian seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh komite sekolah kemudian dimonitor dan dievaluasi bersama sehingga menghasilkan program yang berkualitas dan tepat sasaran. Kegiatan ini

umumnya dilakukan dengan rapat koordinasi dimana setiap pekerjaan akan dipantau proses dan dievaluasi dimana hasil evaluasi akan digunakan untuk penyelesaian program yang telah berjalan. Lain daripada itu, kepala sekolah memiliki cara yang untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi, yaitu dengan pendekatan kekeluargaan melalui kunjungan ke kediaman para pengelola. Melalui kegiatan ini, dimungkinkan suasana akan lebih rileks daripada saat rapat koordinasi sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih detail dan komprehensif.

Sehingga komite sekolah **SMK se-Kabupaten Pati Selatan** dalam hal memantau pelaksanaan program sekolah, yang terdiri dari memantau organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, memantau sumber daya pelaksana program sekolah, memantau partisipasi stakeholder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah, juga dilaksanakan melalui laporan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah. Dalam hal ini Komite Sekolah memberikan masukan atau saran-saran tentang proses belajar mengajar kepada sekolah, misalnya menyarankan untuk selalu memberi tugas rumah kepada siswa agar para siswa tetap belajar di rumah setiap harinya. Pemantauan terhadap output pendidikan merupakan bagian dari kinerja Komite Sekolah dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai badan pengontrol.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam memantau hasil ujian akhir sekolah, angka partisipasi sekolah, memantau

angka mengulang sekolah dan memantau angka bertahan di sekolah dilakukan secara berkelanjutan. Komite melakukan pemantauan melalui laporan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah. Komite Sekolah selalu memperhatikan hasil ujian akhir sekolah. Apabila hasilnya kurang baik Komite selalu mencari penyebabnya dan berusaha mencari solusinya. Untuk meningkatkan mutu lulusan Komite Sekolah juga mengusulkan agar sebelum ujian dilaksanakan, diselenggarakan mujahadah bersama antara wali murid, siswa, dan juga Komite Sekolah, serta guru di mushola sekolah.

Komite Sekolah juga sangat memperhatikan angka partisipasi sekolah, mereka selalu menganjurkan kepada wali murid kelas enam untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih lanjut, sehingga sewaktu ada anak yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi Komite Sekolah datang ke sekolah untuk melaporkannya, sehingga kepala sekolah dan guru kelas enam datang ke rumah siswa tersebut untuk menanyakan apa penyebabnya. Ternyata penyebabnya karena tidak ada biaya dan setelah diberikan solusinya, siswa tersebut bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kinerja Komite Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai badan pengontrol (controlling agency) sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum maksimal karena dilaksanakan bersamaan dengan rapat dan melalui laporan dari pihak sekolah.

4. Analisis Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Komite Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan

Sebagai upaya tindak lanjut hasil evaluasi program komite sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan, komite sekolah sebagai badan penghubung (Mediator Agency) dilakukan melalui keterlibatan Komite dalam manajemen pendidikan (perencanaan, pelaksanaan program, dan pengelolaan sumberdaya pendidikan). Dalam perencanaan Komite Sekolah idealnya menjadi penghubung antara Komite Sekolah dengan masyarakat, Komite Sekolah dengan sekolah dan Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan. Sebagai penghubung Komite Sekolah Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak, sehingga memudahkan dalam kegiatan dan pemecahan permasalahan sekolah. Tetapi sayangnya sampai saat ini Komite Sekolah Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan belum dapat menjalin hubungan dengan Dewan Pendidikan.

Terkait dengan aspirasi dan usulan kebijakan program pendidikan kepada sekolah, Komite Sekolah secara terbuka menerima segala aspirasi masyarakat demi peningkatan kualitas sekolah serta kebutuhan masyarakat. Kinerja Komite Sekolah terkait dengan peran dan fungsi komite dalam pelaksanaan program, turut serta dalam mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat, memfasilitasi berbagai masukan, menampung pengaduan terhadap kebijakan sekolah, serta mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat kepada sekolah.

Jadi setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah aspirasi atau keinginan yang muncul dari masyarakat. Kemudian hasil rapat tersebut disampaikan kepada sekolah untuk ditindak lanjuti dan seterusnya akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program, apa yang dihasilkan dalam musyawarah Komite Sekolah, setelah disetujui pihak Sekolah, disampaikan kepada orang tua siswa baik melalui rapat maupun melalui surat. Semua keluhan yang disampaikan orang tua siswa, ditampung oleh Komite Sekolah yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak sekolah.

Sehingga tindak lanjut dari temuan hasil penelitian tersebut di atas dapat dilakukan dengan Hasil penelitian di atas juga menunjukkan bahwa kinerja Komite Sekolah Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) termasuk cukup baik, karena hanya dilaksanakan bersamaan dengan dengan rapat dan melalui pemerhatian terhadap laporan dari pihak sekolah. Hal itu terjadi karena masing-masing anggota Komite Sekolah mempunyai kegiatan sendiri sesuai profesinya, dan pihak sekolah tidak memiliki anggaran untuk biaya operasional Komite Sekolah.

Komite Sekolah Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan dapat menjalankan fungsi *controlling* dengan baik, meskipun masih diperlukan pembenahan seperlunya, sehingga dapat memperbaiki manajemen biaya pendidikan di sekolah tersebut. Apa ini sudah sesuai dengan amanat pemerintah yang tertuang dalam indikator kinerja Hasil penelitian di atas juga menunjukkan bahwa kinerja Komite Sekolah Sekolah SMK se-

Kabupaten Pati Selatan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai badan penghubung (mediator agency) termasuk cukup baik.

Komite Sekolah sudah berusaha mewujudkan perannya sesuai dengan pendapat yang menyatakan “Tujuan Komite Sekolah adalah: (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan; (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Haryanto, 2008:81)” Dengan kinerja Komite Sekolah sebagaimana disajikan di atas maka komite SMK se-Kabupaten Pati Selatan mengalami peningkatan yang signifikan.

Dengan perkataan lain kinerja Komite Sekolah Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan sebagai badan pertimbangan (advisory agency) dan sebagai badan pendukung (supporting agency), sudah termasuk baik, sedang kinernya sebagai badan pengontrol (controlling agency) dan sebagai badan penghubung (mediator agency), termasuk cukup baik. Peran untuk menjalin hubungan dengan Dewan Pendidikan belum terlaksana. Administrasi Komite Sekolah di Sekolah SMK se-Kabupaten Pati Selatan juga masih perlu pembinaan dan pembenahan, karena sewaktu peneliti mengadakan observasi dan studi dokumen tidak ditemukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Padahal

menurut Permadi D dan Arifin D, salah satu tugas dan fungsi Komite Sekolah adalah menetapkan AD dan ART. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga menyebutkan bahwa Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART. Di samping itu semua kegiatan Komite Sekolah selama ini juga tidak didokumentasikan dengan baik.⁵⁰

D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penulis lakukan, keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara menyeluruh pada SMK se-Kabupaten Pati karena penelitian ini studi kasus dilakukan di satu wilayah SMK yang mengambil obyek hanya wilayah Kabupaten bagian selatan yang terdapat 5 (lima) SMK tetapi hasil penelitian ini dapat juga berlaku pada SMK yang lain.
2. Dalam penelitian ini hanya membahas lima prinsip implementasi manajemen komite sekolah, masih ada prinsip yang lain yaitu suistainabilitas (keberlangsungan) program dan pendanaan sekolah yang tidak diteliti.
3. Keterbatasan lain dalam penelitian ini, diantaranya:
 - a. Penelitian hanya dilakukan pada SMK se-Kabupaten Pati bagian Selatan.

⁵⁰ Permadi D dan Arifin D, *Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Komite Sekolah*, Bandung: PT Sarana Panca Karya Nusa, 2010.

- b. Pembahasan tentang manajemen komite dalam meningkatkan kinerja guru ini hanya dibahas dari aspek a) Evaluasi diri untuk peningkatan mutu guru; b) Perencanaan program peningkatan mutu guru; c) pelaksanaan program manajemen komite sekolah dalam peningkatan mutu guru; d) Kendala komite sekolah dalam menerapkan manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Padahal masih ada aspek-aspek lainnya yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat strategi kepala sekolah dalam peningkatan mutu guru di sekolah.

